

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah berupaya membuat berbagai macam program pembangunan bagi masyarakat dengan tujuan untuk menekan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Sebelum membahas mengenai permasalahan kemiskinan yang terjadi, dapat dilihat terlebih dahulu bagaimana potensi penduduk negara Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 261.890.900 jiwa di tahun 2017 dan diperkirakan mencapai 265 juta jiwa di tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2018). Potensi meningkatnya jumlah penduduk ini sayangnya masih belum diiringi dengan meningkatnya potensi masyarakat yang hidup sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia yang mencapai 25.949.800 jiwa pada tahun 2018 atau sekitar 9,79% penduduk Indonesia tergolong ke dalam penduduk miskin (Badan Pusat Statistik (BPS), 2018).

Diantara jumlah penduduk miskin di Indonesia, maka perempuan adalah kaum yang rentan dan mayoritas hidup dalam keadaan miskin. Persoalan perempuan miskin adalah persoalan struktural dengan faktor penyebab dan kendala yang tidak tunggal. Bukan hanya tentang keterbatasan ekonomi, tetapi juga berbicara tentang adanya kemiskinan yang disebabkan oleh perampasan daya sosial perempuan (akses terhadap informasi, pengetahuan, pengembangan keterampilan, partisipasi dalam organisasi, dan sumber-sumber keuangan); perampasan terhadap daya politik (akses individu pada proses pengambilan keputusan); dan perampasan daya psikologis yang menyebabkan hilangnya kepercayaan diri pada perempuan (Santi, 2007).

Terdapat sekitar tujuh juta perempuan di Indonesia yang berperan sebagai kepala keluarga dan mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan (Kasimin, 2015). Potret demografi karakteristik keluarga miskin di Indonesia tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa persentase Kepala Rumah Tangga (KRT) perempuan yang

Alfina Andriani Dewi, 2019

KEBERDAYAAN PEREMPUAN: TINJAUAN ASPEK RELIGIUSITAS DAN IMPLEMENTASI PROGRAM ISLAMIC MICROFINANCE

JUniversitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

hidup miskin meningkat dari 15,83% (2015), 15,98% (2016), dan menjadi 16,12% (2017) (BPS, 2017). Data potret demografi karakteristik keluarga miskin dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Demografi Rumah Tangga Miskin Tahun 2015-2017

Karakteristik Rumah Tangga	2015	2016	2017
	(Sep)	(Sep)	(Mar)
Tingkat pendidikan kepala rumah tangga (%):			
a. Tidak tamat SD	40,81	37,81	37,44
b. SD	39,78	37,12	37,46
c. SMP	10,35	13,13	13,52
d. SMA	8,47	10,88	10,86
e. PT	0,59	1,06	0,73
Persentase kepala rumah tangga wanita (%)	15,83	15,98	16,12
Sumber utama penghasilan rumah tangga (%):			
a. Tidak bekerja	14,22	13,13	14,38
b. Pertanian	49,60	50,42	49,89
c. Industri	7,10	6,53	7,12
d. Lainnya	29,07	29,92	28,61

Sumber: Data Sosial dan Kependudukan (BPS, 2017)

Perempuan menjadi segmen yang termarginalkan dan seringkali mengalami diskriminasi di dalam keluarganya, lingkungan sosial-ekonomi, kehidupan politik, serta di samping itu adanya budaya tradisional, yakni tugas rumah tangga yang menjadi salah satu rintangan bagi perempuan untuk dapat berdaya dalam hal sosial dan ekonomi (Rehman, Moazzam, & Ansari, 2015).

Kondisi kemiskinan yang terjadi pada perempuan tidak lain disebabkan oleh rendahnya keberdayaan perempuan dalam mengakses sumber daya yang ada. Dengan demikian, keberdayaan perempuan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana perempuan dapat mengembangkan dirinya melalui partisipasi aktif dalam suatu kegiatan, sehingga dapat bekerjasama dengan baik dan membangun kepercayaan sosial yang akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas diri perempuan (Nugroho R. , 2017).

Kajian-kajian konseptual mengenai pemberdayaan masyarakat menyajikan banyak indikator keberdayaan. Menurut Soeharto dalam (Firmansyah, 2012),

Alfina Andriani Dewi, 2019

KEBERDAYAAN PEREMPUAN: TINJAUAN ASPEK RELIGIUSITAS DAN IMPLEMENTASI PROGRAM ISLAMIC MICROFINANCE

JUniversitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

empat diantaranya menyangkut derajat keberdayaan, yaitu tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power within*), tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power to*), tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*), dan tingkat kemampuan membangun kerjasama dan solidaritas (*power with*). Umumnya, perempuan dari kalangan keluarga miskin dinilai masih lemah dalam mencapai derajat keberdayaan tersebut.

Beberapa hal dijadikan sebagai indikator dalam menjelaskan dimensi keberdayaan perempuan, salah satunya adalah *Goals of Women's Empowerment* yang telah dibangun oleh UNDP (*United Nation Development Programme*), yaitu diantaranya: 1) *Gender Inequality Index* atau GII dengan indikator kesehatan, pendidikan, partisipasi politik, dan partisipasi terhadap pasar kerja. 2) *Gender Development Indeks* atau GDI dengan indikator kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. 3) *Gender Empowerment Indeks* atau GEM, dengan indikator ekonomi, sumber daya, dan partisipasi politik (UNDP, 2016).

Adapun salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki pada berbagai bidang pembangunan adalah *Gender Inequality Index* (GII). GII dapat didefinisikan sebagai kesempatan atau risiko perempuan untuk dapat mencapai status/kedudukan tertentu dibandingkan dengan laki-laki dalam bidang kesehatan reproduksi, pemberdayaan, partisipasi politik, dan pasar tenaga kerja (Aktaria & Handoko, 2012).

Indikator kesehatan reproduksi diukur dengan rasio kematian pada ibu dan angka kelahiran pada remaja; pemberdayaan diukur dengan perbandingan tingkat pendidikan minimal pada tingkat pendidikan menengah antara perempuan dan laki-laki dan proporsi perempuan yang duduk di kursi parlemen; serta pasar tenaga kerja yang diukur dari tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki (BPS, 2016).

Rendahnya tingkat keberdayaan perempuan di Indonesia ditunjukkan dengan rendahnya posisi Indonesia dibandingkan dengan negara lain, khususnya negara-negara di Asia Tenggara. Sampai sejauh ini, pengukuran GII dilakukan pada 188 negara. Pencapaian Indonesia dalam perolehan nilai GII masih jauh

tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015 Indonesia menduduki peringkat terakhir dalam perolehan nilai GII, yakni berada di peringkat 105. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum perempuan di Indonesia masih jauh terbelakang secara sosial-ekonomi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Data perolehan nilai GII negara Indonesia selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Perbandingan *Gender Inequality Index* (GII) Indonesia dan Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara Lainnya

No.	Negara	Nilai GII	Peringkat di Dunia
1.	Indonesia	0,467	105
2.	Malaysia	0,291	59
3.	Singapura	0,068	11
4.	Thailand	0,366	79
5.	Vietnam	0,337	71
6.	Myanmar	0,379	80
7.	Filiphina	0,436	96

Sumber: Human Development Report (UNDP, 2016)

Masalah ketertinggalan perempuan dalam bidang kesehatan reproduksi ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian pada ibu, yakni sebanyak 305 pada setiap 100.000 kelahiran hidup (BPS, 2015). Selain itu, menurut Kepala BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) Surya Chandra dalam (Rosmery Sihombing, 2017) pada tahun 2016, angka fertilitas remaja atau jumlah angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun masih tinggi, yakni 36 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang menunjukkan angka 48 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (Puspitasari, 2015). Namun, capaian tersebut masih jauh dari target MGDs (*Millennium Development Goals*) tahun 2015 yaitu sekitar 30 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Dengan demikian, kedua hal tersebut menunjukkan bahwa keberdayaan perempuan dalam bidang kesehatan masih dinilai rendah.

Selain tingkat kesehatan reproduksi pada perempuan yang dinilai masih rendah, dalam dimensi pemberdayaan pun perempuan masih berada pada posisi yang masih tertinggal jika dibandingkan dengan laki-laki. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyatakan bahwa Indonesia memiliki 9 menteri perempuan dari

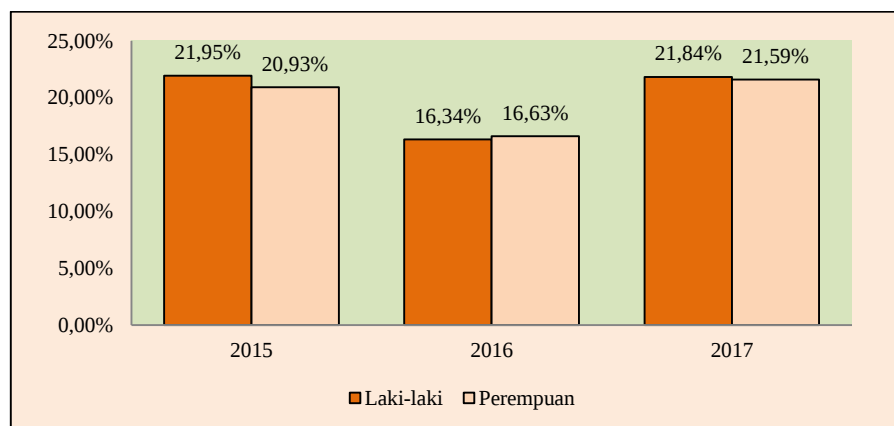
Alfina Andriani Dewi, 2019

KEBERDAYAAN PEREMPUAN: TINJAUAN ASPEK RELIGIUSITAS DAN IMPLEMENTASI PROGRAM ISLAMIC MICROFINANCE

JUniversitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

35 kursi di kabinet atau hanya sekitar 25,7% (Nugroho B. P., 2018), itu artinya keikutsertaan perempuan dalam ranah politik jauh tertinggal jika dibandingkan dengan laki-laki.

Pengukuran indikator keberdayaan lainnya dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, minimal setara Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada tahun 2016 jumlah perempuan sempat melebihi jumlah laki-laki dalam menamatkan jenjang pendidikan SMP yang sebelumnya berada pada posisi yang lebih rendah. Namun, pada tahun 2017 perempuan kembali menempati posisi yang lebih rendah dari pada laki-laki dalam menamatkan jenjang pendidikan SMP, yaitu sebesar 21,59% sedangkan laki-laki sebesar 21,84%. Hal tersebut lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Perbandingan Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan yang Berusia 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (Minimal Tingkat SMP)

Sumber: Data Sosial Kependudukan Indonesia (BPS, 2017)

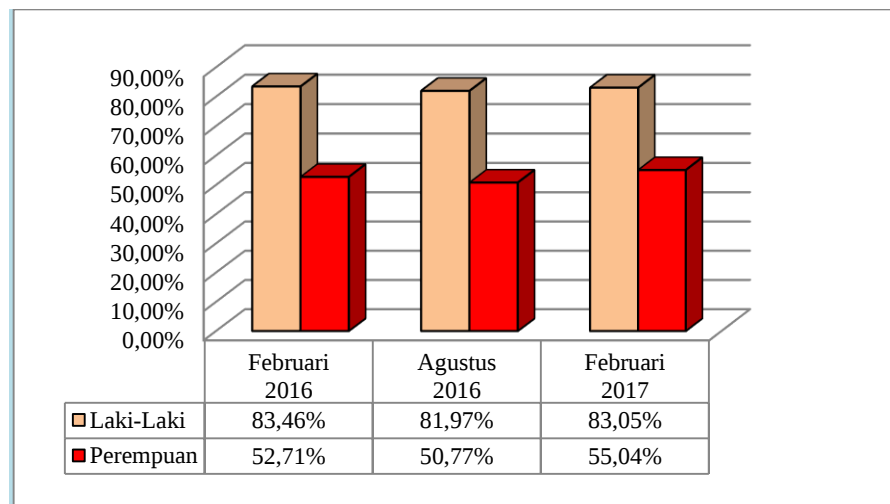
Indikator lain dalam mengukur keberdayaan perempuan yang merupakan komponen dari penilaian GII adalah partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Hal tersebut salah satunya dapat diukur dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang dibandingkan dengan TPAK laki-laki. Dalam kurun waktu tahun 2016-2017, TPAK perempuan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan TPAK laki-laki. Data menunjukkan bahwa TPAK perempuan pada tahun 2016 periode akhir sebesar 50,77% jauh tertinggal sebesar 31,20% dari TPAK

Alfina Andriani Dewi, 2019

KEBERDAYAAN PEREMPUAN: TINJAUAN ASPEK RELIGIUSITAS DAN IMPLEMENTASI PROGRAM ISLAMIC MICROFINANCE

JUniversitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

laki-laki. Pada tahun 2017 pun menunjukkan ketertinggalan perempuan dalam jumlah TPAK, yakni sebesar 55,04% lebih rendah 33,01% dari TPAK laki-laki. Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2016-2017

Sumber: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia (Tumoutou, 2017)

Telah banyak program yang digulirkan baik oleh pemerintah maupun swasta dengan tujuan untuk meningkatkan keberdayaan perempuan, diantaranya Program Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL), Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Program Kredit Keluarga Sejahtera (Kukesra), dan masih banyak program-program lainnya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, 2012).

Namun, kebijakan melalui berbagai program pemberdayaan perempuan seringkali kurang tepat dalam pelaksanaannya, sehingga kurang efektif dalam menekan angka kemiskinan khususnya yang terjadi pada perempuan. Konsep *triple burden of women*, yakni perempuan dihadapkan pada tiga fungsi, yaitu dalam ranah reproduksi, produksi sekaligus fungsi sosial di masyarakat membuatnya mendominasi dalam menanggung beban keluarga. Padahal, konsep pemberdayaan perempuan diartikan sebagai penguat ekonomi keluarga tanpa menggeser peran dan fungsi laki-laki sebagai penanggungjawab utama keluarga (Pakkanna, 2017).

Alfina Andriani Dewi, 2019

KEBERDAYAAN PEREMPUAN: TINJAUAN ASPEK RELIGIUSITAS DAN IMPLEMENTASI PROGRAM ISLAMIC MICROFINANCE

JUniversitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Di tengah isu program pemberdayaan perempuan yang semakin gencar dilaksanakan, seringkali pemberdayaan perempuan ini dikaitkan pada konsep *gender* dan feminisme yang menuntut adanya kebebasan tanpa batas pada perempuan. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi pada perempuan seringkali hanya bertujuan pada aspek pencapaian penguasaan materi dari perempuan tersebut (Nurasyiah, 2017). Hal itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Amartya Sen tentang Konsep Kapabilitas. Beliau menyatakan bahwa suatu pembangunan tidak dapat dikatakan berhasil sebelum terjadi keseimbangan antara faktor materi dan non-materi (dimana indikator kebebasan yang menjadi faktor substansinya) (Indarti, 2017). Oleh karena itu, dengan adanya kebebasan tanpa batas yang dibangun oleh konsep konvensional sering kali menjadikan perempuan lupa akan tugas dan tanggungjawab utamanya sebagai perempuan.

Islam sebagai agama yang sempurna, jauh-jauh hari telah mengatur bagaimana permasalahan perempuan yang berada dalam lingkaran kemiskinan melalui pemberdayaan. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai tugas dan kesempatan yang sama dalam memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Keduanya pun mempunyai hak yang sama dalam memperoleh ilmu seperti apa yang telah diriwayatkan dalam hadits riwayat Ahmad dan Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, *"Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim"*. Hadits tersebut menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan tanpa terkecuali mempunyai kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu.

Islam pun telah menjamin hak perempuan untuk bekerja sesuai tabiat dan aturan-aturan syari'at dengan tujuan untuk menjaga kehormatan perempuan. Hal tersebut telah tercantum secara tersirat di dalam firman Allah SWT yakni dalam Q.S Al-Jumu'ah ayat 10 dan Q.S An-Nisaa ayat 32,



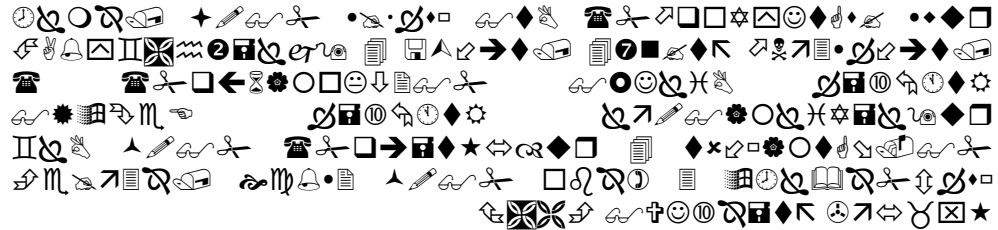
Alfina Andriani Dewi, 2019

KEBERDAYAAN PEREMPUAN: TINJAUAN ASPEK RELIGIUSITAS DAN IMPLEMENTASI PROGRAM ISLAMIC MICROFINANCE

)Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu’ah: 10)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:



Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S An-Nisaa: 32)

Berdasarkan kedua ayat di atas, dapat dipahami dan dapat diberikan kesimpulan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam bekerja. Hanya saja, ada batasan bagi perempuan dalam memperoleh pekerjaan. Beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan perempuan untuk bekerja mensyaratkan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah harus menutup auratnya; menghindari fitnah (bercampur baur dengan laki-laki); mendapatkan izin dari orangtua, wali atau suami bagi yang telah menikah; tetap menjalankan kewajiban di rumah (mengurusi pekerjaan rumah tangga dan mendidik anak); pekerjaannya tidak menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki (dokter, guru) (Rosalia, 2016).

Perempuan dari kalangan keluarga miskin umumnya terserap pada sektor-sektor informal yang salah satunya adalah sebagai pedagang kecil atau berwirausaha (Awaworyi, 2014). Islam sendiri pun di dalam Al-Qur’an dan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa seorang muslim dianjurkan untuk berdagang atau berwirausaha (Juliana, Marlina, Saripudin, & Khatimah, 2017). Namun, dalam berwirausaha ini perempuan seringkali kesulitan dalam mengakses permodalan sehingga tidak jarang mereka terjebak dalam permainan para rentenir yang alih-alih membantu padahal

menjerumuskan mereka pada tingkat kemiskinan yang lebih parah (Malik & Lukman, 2005).

Menilik beberapa indikator keberdayaan masyarakat yang telah dipaparkan di atas, maka kiranya dibutuhkan strategi untuk mencapai tingkat keberdayaan yang optimal, khususnya keberdayaan perempuan. Beberapa strategi diantaranya adalah melalui pendidikan dan pelatihan, program kredit, teknologi, media informasi, dan pembentukan kelompok perempuan (Parveen, 2007). Untuk mencapai itu semua, dibutuhkan pihak-pihak yang fokus dan berdedikasi tinggi dalam membangun tingkat keberdayaan perempuan yang lebih baik.

Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhiid (KOPMU-DT) Bandung merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syari'ah yang memiliki perhatian tinggi terhadap tingkat keberdayaan perempuan, terutama kepada perempuan yang telah menikah maupun yang pernah menikah (janda). KOPMU-DT tidak hanya memberikan bantuan modal kepada para anggotanya, tetapi juga membina para anggotanya dengan jalan membentuk kelompok perempuan untuk kemudian diberikan pendampingan baik dalam hal pendampingan usaha maupun pendampingan spiritual, sehingga menjadikan para anggotanya dapat berhasil bukan hanya dalam hal meningkatkan perekonomian, tetapi juga bertekad menjadikan anggotanya memiliki karakter.

Penanaman nilai ini memiliki muatan nilai religiusitas yang sangat berperan penting bagi kehidupan sosial seseorang. Keberdayaan erat kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan seseorang, oleh karenanya tingkat religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan fisik maupun psikis (Sadewa, Budiman, & Mairijani, 2015). Kesejahteraan yang kaya akan berkah hanya akan dicapai dengan menerapkan ajaran agama pada setiap aspek kehidupan. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan pandangan barat yang tidak memasukkan aspek religiusitas dalam mengukur tingkat keberdayaan dan kesejahteraan, namun hanya mengedepankan aspek pencapaian materiil yang diperoleh seseorang (Nurasyiah, 2017).

KOPMU-DT tidak menjadikan perempuan yang menjadi anggotanya sebagai pengganti peran suami sebagai kepala rumah tangga, namun

menjadikannya mandiri dan berdaya tanpa harus menggeser perannya sebagai perempuan, baik di keluarga maupun di masyarakat (Rustandi, 2018). Hal ini sejalan dengan strategi pemberdayaan perempuan yang telah dipaparkan oleh Parveen sebelumnya.

Peran lembaga keuangan mikro tidak dipungkiri dapat menjadi alat untuk menekan angka kemiskinan, khususnya pada perempuan (Rahman A. R., 2010). Grameen Bank contohnya, mampu mendorong sebanyak kurang lebih 58% peminjamnya untuk keluar dari garis kemiskinan (Rahman M. M., 2010). Grameen Bank menjadi hal yang menarik perhatian, karena sekitar 97% dari 6,61 juta nasabahnya terdiri dari perempuan (Rouf, 2014).

Secara empiris, terdapat hasil kajian riset terdahulu terkait keberdayaan perempuan dan bagaimana peranan lembaga keuangan mikro dalam meningkatkan keberdayaan perempuan, antara lain dinyatakan bahwa semakin aktif perempuan yang merupakan ibu rumah tangga dalam partisipasi kerja, semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, semakin tinggi peran perempuan dalam keluarganya, semakin tinggi aktivitas pendampingan yang diikuti perempuan, maka semakin tinggi tingkat keberdayaan perempuan. Dengan kata lain, keempatnya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberdayaan perempuan, sedangkan religiusitas dan program pemberdayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap keberdayaan perempuan (Nurasyiah, 2017).

Penelitian lain terkait peran lembaga keuangan mikro dalam meningkatkan keberdayaan perempuan, diantaranya dinyatakan bahwa kredit dan pelatihan berdampak positif terhadap pengusaha perempuan di Tanzania (Kuzilwa, 2005). Perempuan yang merupakan anggota BMT memiliki kontrol atas tabungan dan pendapatan usaha, pengambilan keputusan, mobilitas dan partisipasi dalam kegiatan di luar rumah lebih baik dibandingkan dengan perempuan yang non-anggota BMT (Rahayu, 2015). Namun, dalam penelitian lain menyatakan bahwa program kredit mikro juga memiliki dampak yang negatif bagi keberdayaan perempuan. Malik dan Luqman (2005) menyatakan bahwa program kredit mikro menimbulkan lingkungan yang lebih ketat bagi perempuan seiring dengan

meningkatnya beban kerja dan tanggungjawab selain dari pada tanggungjawabnya di dalam keluarga.

Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberdayaan perempuan dari adanya program pemberdayaan perempuan yang digulirkan oleh KOPMU-DT. Pengukuran tingkat keberdayaan perempuan dalam penelitian ini akan menggunakan indikator *Islamic Women Empowerment Index* yang telah dikembangkan oleh Nurasyiah (2017) atas indikator yang dibangun sebelumnya, yakni indikator *Women Empowerment Index* oleh Haque, et.all (2011).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan dan hasil-hasil riset sebelumnya, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana tingkat religiusitas mempengaruhi keberdayaan perempuan serta implementasi program *Islamic microfinance* dampaknya terhadap keberdayaan perempuan dengan menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul: **“Keberdayaan Perempuan: Tinjauan Aspek Religiusitas dan Implementasi Program *Islamic Microfinance* (Survei pada Anggota KOPMU-DT)”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Perempuan menjadi lapisan termiskin di dalam masyarakat. Kesulitan kaum perempuan dalam memperoleh akses pelayanan umum di masyarakat, menjadikannya miskin dalam hal ekonomi, pendidikan, sosial dan politik (Rahayu, 2015);
2. Kepala Rumah Tangga (KRT) wanita yang hidup dalam keadaan miskin rata-rata menggantungkan hidupnya pada usaha informal (mikro) (BPS, 2017);
3. Model pemberdayaan sosial-ekonomi pada perempuan dan keluarga miskin yang diadakan oleh lembaga pembiayaan konvensional seringkali salah pandangan yang menyebabkan cara pandang dan perilaku anggotanya hanya berorientasi pada penguasaan materi saja yang tidak

jarang perempuan lupa akan tugas utama dan hakikatnya sebagai perempuan (Nurasyiah, 2017);

4. Penelitian mengenai lembaga keuangan mikro syari'ah dan keberdayaan perempuan masih sangat terbatas, mayoritas studi sebelumnya berfokus pada lembaga keuangan mikro konvensional (Rahayu, 2015).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat keberdayaan perempuan di KOPMU-DT?
2. Bagaimana tingkat religiusitas perempuan di KOPMU-DT?
3. Bagaimana implementasi program *Islamic microfinance* (pembiayaan syari'ah dan pendampingan) di KOPMU-DT?
4. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap keberdayaan perempuan?
5. Bagaimana pengaruh pembiayaan syari'ah terhadap keberdayaan perempuan?
6. Bagaimana pengaruh pendampingan terhadap keberdayaan perempuan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah untuk memperoleh gambaran tingkat keberdayaan perempuan yang menjadi anggota KOPMU-DT. Selain itu, penelitian ini pun bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat religiusitas perempuan anggota KOPMU-DT serta gambaran pelaksanaan program *Islamic microfinance* yang terdiri dari pembiayaan syari'ah dan pendampingan di KOPMU-DT. Selanjutnya, pada penelitian ini pun akan dianalisis mengenai pengaruh religiusitas dan implementasi program *Islamic microfinance* yang terdiri dari pembiayaan syari'ah dan pendampingan terhadap tingkat keberdayaan perempuan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat terutama kaum perempuan juga bagi lembaga-lembaga keuangan mikro pada khususnya, mengenai langkah-langkah meningkatkan keberdayaan perempuan

melalui program pembiayaan syari'ah dan pendampingan yang berintegrasikan dan berkesinambungan.